

PENGARUH CHINA DALAM MENDUKUNG PERDAMAIAN KELOMPOK ETNIS BERSENJATA *UNITED WA STATE ARMY* DI MYANMAR

Astri Ratna Prakasitari

Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Email : astri.ratna.2014@fisipol.umy.ac.id

ABSTRAK

Tulisan ini mencoba menggambarkan sikap politik China di Myanmar terkait dengan permasalahan etnis. Konflik etnis telah menjadi sejarah kelam bagi Myanmar, ratusan bahkan jutaan korban berjatuh, pengungsi membanjir ke kawasan Asia Tenggara dan sekitarnya, bahkan isu pelanggaran HAM terus menjadi perhatian utama masyarakat internasional. Myanmar kini tengah mencoba kembali membangun perdamaian di negaranya melalui banyak negosiasi damai seperti *Nationwide Ceasefire Agreement* dan *The Panglong 21st Century* yang dimulai sejak tahun 2015. Proses ini membuat China sebagai negara yang berbatasan langsung dengan Myanmar merasa wajib turun tangan untuk menjadi pihak solutif yang mendukung setiap langkah menuju perdamaian. Dengan menggunakan dua pandangan, *economy-security nexus* dan teori stabilitas hegemonik, China memiliki strategi sendiri untuk menempatkan peran terbaiknya dalam upaya perdamaian etnis di Myanmar.

Keywords: *Economy-Security Nexus, Hegemonic Stability, United Wa State Army, Perdamaian etnis Myanmar, Hegemoni China*

Pendahuluan

Konflik etnis merupakan hal yang umum terjadi, terutama bagi negara yang memiliki diversitas etnik tinggi seperti Myanmar. Terdiri dari 135 etnis, masyarakat Myanmar secara otomatis terklasifikasikan sebagai golongan minoritas atau mayoritas yang cenderung menjadi sebab utama konflik terjadi. Konflik etnis di Myanmar tidak semata konflik antara pemerintah dan pemberontak atau kelompok primordial, tetapi juga antar etnis minoritas baik berebut wilayah atau sumber daya (Wilson, 2006). Salah satu etnis yang terkenal akan kekuatan ekonomi dan militernya, bahkan dinilai menjadi salah satu kelompok yang dihormati diantara

minoritas lainnya adalah etnis Wa, atau lebih dikenal dengan United Wa State Army (UWSA). Di ranah domestik, UWSA menjadi etnis bersenjata terbesar di seluruh Myanmar, dengan total 20.000-30.000 tentara dan 10.000 anggota lain diluar kemiliteran (Kuppuswamy, 2013) Selain itu, UWSA dikenal menjadi etnis yang mampu untuk memenuhi kebutuhannya sendiri dengan bergantung dari hasil penjualan opium hingga membuatnya mendapat julukan “*the darling of international drug syndicates*” (The Star, 2017). Kekuatan etnis Wa tersebut dinilai akan memberikan pengaruh bagi perdamaian etnis yang mulai tahun 2015 diusung oleh Myanmar.

Perdamaian etnis yang mulai muncul bersamaan dengan demokratisasi di Myanmar inipun menarik China sebagai mitra utama dan tetangga yang berbatasan langsung dengan Myanmar. China mengawali perannya dalam perdamaian etnis di Myanmar ini dengan mengeluarkan kebijakan resmi “*persuading for peace and facilitating dialogue*” (Sun, 2017). Kebijakan ini sering dikaitkan dengan relasi antara China dan etnis UWSA, dimana etnis Wa dirasa memiliki hubungan erat dengan China (Kramer, 2007). Hal ini dibuktikan dengan tanda jalan, toko dan bangunan di negara bagian Wa ditulis dalam bahasa mandarin, bisnis dan mata uang China tersebar dan menjadi pemandangan biasa setiap hari, bahkan bahasa percakapan pun mayoritas menggunakan bahasa mandarin (Reuters, 2016).

Namun, permasalahan ini tidak dapat dilihat dari satu perspektif semata. China dikenal memiliki kedekatan juga dengan Myanmar, sejak embargo ekonomi dari Amerika dibebankan pada negara dunia ketiga tersebut. China bahkan secara serius menanggapi upaya perdamaian ini dengan membentuk perwakilan khusus dan mengirimkannya ke Myanmar. Hal ini sesuai dengan kebijakan China di awal untuk senantiasa mendukung perdamaian dan memfasilitasi upaya untuk merealisasikannya. Usaha perdamaian pun mengalami masa pasang surut. Adakalanya beberapa etnis berhasil patuh dan melakukan gencatan senjata karena terikat perjanjian dengan pemerintah Myanmar, namun ada pula kalanya etnis-etnis menolak untuk patuh dan berusaha untuk meraih kepentingannya baik itu memisahkan diri dari Myanmar atau meraih otonomi penuh. Merespon hal tersebut, China semakin memantapkan posisi dan perannya di dalam upaya perdamaian yang kini tengah diusung Myanmar. Melalui berbagai sikap politik, China berupaya menciptakan kedamaian di negara Myanmar.

Ekonomi Sebagai Jalan Pembuka Keterlibatan China Dalam Perdamaian UWSA Di Myanmar

China cukup menimbulkan banyak praduga terkait hubungannya dengan salah satu kelompok etnis pemberontak di Myanmar yakni *United Wa State Army*. Hubungan tersebut

diawali dari kedekatan China dengan kelompok Communist Party of Burma (CPB) sejak era komunisme. Pada tahun 1950an, beberapa kelompok CPB datang ke China untuk meminta bantuan persenjataan pemberontakan di Burma. Mereka adalah kelompok yang terbuang akibat desakan dari pemerintah Myanmar saat itu, U Nu. Selama U Nu memegang kekuasaan di Myanmar, kelompok CPB tinggal di Sichuan China bahkan menghadiri sekolah komunis China. Selain itu, tercatat sekitar 1357 mil perbatasan ada dibawah kekuasaan CPB yang memiliki hubungan kedekatan dengan China (Lintner, 2017).

Keberadaan CPB menjadi ancaman besar bagi pemerintahan Myanmar. Sejak tahun 1953, CPB menjadi partai yang diancam keberadaanya dan pada akhirnya bubar di tahun 1989 (Tha, 2013). Myanmar secara tegas memberikan sinyal pada China bahwa tidak mengizinkan adanya bantuan terhadap kelompok pemberontak CPB bagaimanapun terbatasnya itu. Sebagai mitra dari Myanmar, tentu China merespon hal tersebut dengan menghentikan segala hubungannya terkait CPB. Kejayaan CPB selanjutnya pun tidak berlangsung lama. Setelah sekitar 4 dekade, CPB mulai melangkah menuju akhir dari eksistensinya. Bubarnya CPB yang merupakan kelompok pemberontak terbesar ini tidak lantas menghentikan gejolak konflik di Myanmar. Kelompok pemberontak baru muncul sebagai hasil dari pecahan CPB seperti Kachin, Shan dan Wa. Berawal dari dekatnya hubungan dengan CPB, China pun memiliki hubungan yang cukup dekat dengan ketiga etnis tersebut, walau bukanlah suatu hubungan yang diakui secara resmi. Pemerintah China seringkali menolak keterkaitan negaranya dengan eksistensi kelompok pemberontak di Myanmar. Namun, kedekatan antara etnis –etnis di Myanmar dan China tersebut tetap terjadi tanpa disadari, walau bukan bersifat *government to government*.

Etnis Wa merupakan etnis yang memiliki tingkat kedekatan cukup tinggi dengan masyarakat China, jika dibandingkan etnis-etnis pecahan CPB lainnya. Walau etnis Wa bukan salah satu etnis dari China, terdapat beberapa kelompok etnis Wa yang menjadi etnis minoritas di Yunan, dataran China (Lintner, Who Are The Wa?, 2017). Adanya persamaan etnis tersebut membuat China dan etnis Wa secara tersirat dekat dalam berbagai aspek seperti ekonomi, sosial, budaya, dll. Pengaruh China terdapat pada hampir semua aspek di kehidupan etnis Wa, hubungan yang mendominasi adalah ekonomi. Berkesinambungan dengan predikat China yang merupakan salah satu negara dengan tingkat perekonomian tertinggi di dunia, hubungan ekonomi yang menguntungkan lebih banyak dijalin oleh China dibandingkan hubungan lainnya.

Hubungan ekonomi antara China dan UWSA mayoritas didominasi oleh transaksi transnasional (*people to people*). Bersamaan dengan pola ekonomi liberal yang diadopsi China, masyarakat China berbondong-bondong mencari hubungan yang menguntungkan secara materi hingga ke negara-negara di sekitarnya. Hal ini memang cukup menyulitkan pemerintah China untuk mengetahui pergerakan uang, saham dan investasi dari maupun keluar China. Kesulitan pemerintah ini dibuktikan dengan adanya kasus mengenai salah satu perusahaan China yang menjalin hubungan kerjasama dan menimbulkan kontroversi cukup besar di bidang ekonomi adalah Yucheng Group.

Perusahaan Yucheng merupakan perusahaan terkemuka di China yang menginovasi adanya platform perdagangan online, EzuBao. Kini Yucheng sedang menjalani investigasi atas tindakannya yang dianggap sebagai suatu kejahatan. Yucheng diduga menjadi donatur atau investor utama atas pembiayaan biaya pemberontakan yang dilakukan oleh UWSA di Myanmar. Sebuah perjanjian perdagangan dibangun bersama dengan UWSA untuk membangun sebuah Zona Perdagangan Bebas Asia Tenggara milik Yucheng dengan total investasi sebanyak 40 juta RMB (Sun, 2017). Tidak berhenti sampai situ, Yucheng juga menjadi pasar bagi penjualan senjata dan tentara untuk UWSA. Namun, dalam investigasinya pada tahun 2015, Yucheng berkilah bahwa pendanaannya untuk UWSA itu dilakukan sebagai salah satu realisasi OBOR China (Sun, 2017). Pemerintah China pun merespon pernyataan tersebut dengan negatif dan mengadakan penyelidikan lebih lanjut untuk aktivitas perusahaan tersebut.

Tidak berhenti pada satu perusahaan saja, masyarakat dengan kesamaan etnis di China pun turut membantu pendanaan bagi eksistensi UWSA. Sebagai contoh, perusahaan senjata Kunma yang menjadi salah satu sumber utama pendanaan UWSA berdiri dengan bantuan dari masyarakat-masyarakat China. Ahli Senjata dari China membimbing langsung UWSA untuk memproduksi senjata buatan China yang kemudian menjadikannya berhasil mendirikan gudang penjualan senjata di Manipur, India dan di perbatasan China-Myanmar (Keenan, 2016). Senjata buatan China yang diproduksi oleh UWSA tersebut memang bersifat ilegal, tetapi peminatnya cukup banyak karena berhasil di ekspor ke kawasan India dan Bangladesh (Keenan, 2016). Perusahaan-perusahaan yang didirikan UWSA dengan berkolaborasi dengan masyarakat China tersebut menjadi pendanaan utama untuk pemberontakan yang mereka lakukan. Perusahaan senjata Kunma tersebut menjadi tamparan hebat yang memalukan bagi China karena itu berdiri ilegal dan membawa nama negaranya. China meminta penutupan langsung dan kini tidak ada yang tertinggal dari eksistensi perusahaan tersebut kecuali tetap

beredarnya senjata China buatan UWSA tersebut yang di selundupkan melalui Assam, Nagaland dan Manipur (Lintner dalam Keenan, 2016)

Secara resmi, China melakukan hubungan ekspor impor. Ekspor dari China berupa barang-barang rumah tangga yang banyak diminati masyarakat etnis Wa, sementara impor dari UWSA berupa kayu. Bersamaan dengan meningkatnya hubungan ekspor-impor antara kedua negara tersebut, China pun membuka pintu dagang khusus yang berada di kawasan perbatasan dan dikuasai etnis bersangkutan (Transnational Institute, 2016). Adanya pembukaan pintu dagang khusus ini pun membuat China semakin mudah untuk menciptakan proyek ekonomis di kawasan Myanmar, dimana salah satunya adalah proyek pipa gas yang berada di kawasan UWSA, berbatasan langsung dengan salah satu provinsi di China yakni Yunnan.

Keamanan Myanmar sebagai Cermin dari Hubungan China dan UWSA

Dekatnya hubungan antara China dan UWSA ini menjadi gerbang baru yang secara tersirat memberikan peran bagi China untuk andil dalam permasalahan di Myanmar khususnya konflik etnis. Keterlibatan China ini dimulai dari hal kecil yakni adanya pengawasan langsung di kawasan etnis Wa. China dikabarkan memiliki mata dan telinga untuk setiap aktivitas dan kebijakan yang berada di kawasan tersebut (Slodkowski & Lee, 2016). Secara resmi, upaya China untuk memberikan pengaruh dan peran pada proses rekonsiliasi atau perdamaian di Myanmar ini sudah dituangkan pada kebijakannya yakni “*persuading for peace and facilitating dialogues*” (劝和促谈 dalam Sun, 2017). Kebijakan tersebut diikuti dengan penunjukan Wang Yingfan sebagai utusan khusus pertama untuk permasalahan Asia. Penunjukan utusan tersebut ditujukan sebagai jembatan dan jalan tengah, sebagai sarana untuk bernegosiasi dengan etnis-etnis partisipan dalam rekonsiliasi Myanmar. Melalui utusan-utusannya, China tidak berhenti berupaya mengajak etnis-etnis untuk bersikap positif menanggapi usulan rekonsiliasi pemerintah Myanmar. Bersamaan dengan perwakilan dari PBB, diskusi dan negosiasi baik antar etnis maupun etnis dengan pemerintah terjadi dan difasilitasi. Bahkan China menawarkan 3 juta dollar untuk memfasilitasi negosiasi etnis terkait NCA yang pertama (Vrieze, 2017)

Tidak hanya melakukan bantuan melalui kontak langsung dengan etnis, China juga mencoba memberikan perannya pada pemerintah Myanmar (Tatmadaw) dengan membentuk organisasi perwakilan di sepanjang China-Myanmar bersama dengan etnis terkait dan pemerintah Myanmar sendiri (Keenan, 2016). Organisasi perwakilan tersebut dibentuk guna

menyelesaikan permasalahan-permasalahan terutama konflik militer yang sering terjadi di perbatasan. Jauhnya letak perbatasan dengan pusat terkadang menciptakan keadaan yang lebih buruk. Oleh karena itu, konflik dapat terselesaikan dengan damai dan tenang dibantu oleh keberadaan organisasi tersebut. Dalamnya peran China ini ditunjukkan oleh sikap UWSA yang senantiasa meminta China untuk menjadi saksi atau mediator bagi setiap negosiasi yang berlangsung antara etnis dan pemerintah Myanmar (Mang, Aung, & Dinmore, 2016). China pun bahkan menjadi harapan pertama UWSA ketika badan negosiasinya dalam NCA, *Federal Political Negotiation and Consultative Committee* , tidak mendapatkan hak untuk menyuarakan opininya di NCA karena telah menolak untuk menandatangani perjanjian sebelumnya. Penolakan ratifikasi tersebut mengeluarkan UWSA dan etnis-etnis lainnya sebagai partisipan NCA. Namun, berkat adanya bantuan dari China, anggota Federal Political Negotiation and Consultative Committee yang bukan merupakan etnis partisipan NCA diperbolehkan untuk menghadiri upacara pembukaan 21st-Century Panglong Conference

Berlandaskan konsep Economy – Security Nexus, peran aktif China, yang diawali oleh ketergantungan ekonomi dengan UWSA, dalam proses perdamaian ini secara tidak langsung akan memberikan pengaruh pada keamanan Myanmar. Konsep Economy-Security Nexus menggambarkan tentang hubungan yang kompleks antara ekonomi dan keamanan. Menggambarkan bagaimana ekonomi dan keamanan berinteraksi satu sama lain dan seberapa besar pengaruh ketergantungan ekonomi mempengaruhi aspek keamanan. Konsep ini menekankan bahwa kedekatan hubungan ekonomi dapat meningkatkan atau mengurangi keamanan suatu bangsa (Pempel, 2013). Jika dalam liberalisme ketergantungan ekonomi dipastikan akan membawa kedamaian, Economy-Security Nexus menyediakan banyak opsi lain, bukan hanya positif tetapi juga negatif, sebagai dampak dari ketergantungan ekonomi.

Suatu hal yang menarik jika menilik akan adanya ketergantungan ekonomi antara *state dan non-state actor* , yang mana keduanya memiliki perbedaan dalam kewarganegaraan dan salah satu aktor mempunyai sejarah sebagai kelompok pemberontak bagi negara lain. Hubungan yang dekat antara China dan UWSA dibidang ekonomi cenderung erat dan membuktikan bahwa hal ini bisa menjadi jalan keluar bagi rekonsiliasi yang dilakukan oleh Myanmar. Kebijakan UWSA dalam menanggapi setiap proses rekonsiliasi yang ditawarkan Myanmar tidak dapat dilepaskan dari pengaruh China. Terlihat kedekatan ekonomi membuat hubungan keduanya semakin erat dibidang lainnya termasuk politik. UWSA menunjukkan kedekatannya dengan China melalui sikap politik seperti, permintaan keturutsertaan China sebagai pihak tengah yang berperan aktif dalam rekonsiliasi Myanmar. China pun melakukan

hal yang sama dengan mengeluarkan sikap-sikap politik seperti mengeluarkan kebijakan bersifat suportif, mengirimkan utusan khusus untuk membantu bernegosiasi dengan pemerintah Myanmar, bahkan menawarkan bantuan dana khusus untuk penyelenggaraan diskusi terkait perdamaian di Myanmar.

Pemerintah Myanmar merespon hal tersebut dengan positif karena China mendukung terjadinya proses rekonsiliasi ini. Dekatnya hubungan antara China dan UWSA sebagai etnis pemberontak di Myanmar ini dinilai juga memberikan suatu keuntungan bagi Myanmar sebagai pihak di luar variabel. Keuntungan yang diperoleh oleh Myanmar tersebut tidak lain adalah bantuan dukungan di bidang keamanan. Myanmar tentu membutuhkan UWSA sebagai salah satu pihak pendukung dalam agenda perdamaian konflik etnis, terlebih UWSA merupakan salah satu etnis bersenjata terbesar dan dijadikan panutan dari etnis-etnis minoritas dibawahnya.

Kehadiran UWSA apabila mendukung proses rekonsiliasi ini tentu akan menjadi kemenangan besar bagi Myanmar karena secara otomatis, etnis-etnis minoritas lain yang berada di bawah kekuasaan atau berada di dalam forum yang sama dengan UWSA akan turut meratifikasi perjanjian damai tersebut. Selama ini, Myanmar dan UWSA cenderung sulit untuk melakukan komunikasi karena sifat UWSA yang cenderung enggan untuk menandatangani perjanjian ulang karena perjanjian Panglong di tahun 1947 telah cukup untuk mengikat mereka menjadi *ceasefire groups*. Oleh karena itu, sangat diperlukannya peran China untuk membantu menciptakan kondisi yang mempercepat terjadinya proses rekonsiliasi ini. Kedekatan hubungan antara China dan UWSA dapat menjadi faktor penting masuknya peran China untuk merealisasikan rekonsiliasi di Myanmar. China dapat menjadi aktor pendorong UWSA untuk bersikap positif dalam merespon kebijakan Myanmar di perdamaian ini.

Kebijakan Luar Negeri China Di Myanmar Sebagai Produk Politik Hegemoni

China merupakan negara yang memiliki tingkat GDP yang tinggi bahkan melampaui Amerika Serikat sebagai negara adidaya (World Bank, 2017). Kenaikan nilai GDP China terlihat mengungguli Amerika dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun 1984 misalnya, China mendapat poin 15,1 sebagai tingkat pertumbuhan GDPnya, sementara Amerika hanya meraih poin 7,2. Di tahun 1992, 2007 dan juga 2010, nilai-nilai tinggi juga terus dilambungkan China jauh diatas Amerika Serikat untuk perbandingan GDP, belum sekalipun nilai tersebut mampu dihalau oleh kekuatan ekonomi Amerika. Pasar China pun tergolong unggul diantara

negara lainnya, dimana tidak lagi mencakup kawasan Asia, tetapi sudah merambah ke berbagai penjuru dunia. Beberapa negara menjadikan China sebagai partner dagang terbesarnya, tak terkecuali Amerika Serikat. Amerika sebagai negara adidaya bahkan menjadi partner terbesar dalam hal perdagangan dengan China di tahun 2016, sebanyak 16 % produk China merupakan komoditas impor bagi Amerika (The Observatory of Economic Complexity, 2018). Pada tahun 2016 wilayah pasar China baik ekspor maupun impor sudah melingkupi mayoritas negara di dunia (GlobalEDGE, 2017).

Kekuatan China yang meningkat secara massive tersebut secara tidak langsung memenuhi kualifikasi negara yang dinilai memiliki kekuatan hegemoni. Namun China menyatakan dengan tegas bahwasanya China tidak akan pernah mencari hegemoni atau berdiri diatas keruntuhan negara lain (Xinhua, 2017). Hal ini dimaknai positif oleh negara-negara dunia ketiga yang berada di sekitarnya seperti India, Vietnam, Myanmar dsb. Bagi negara-negara tersebut, kebangkitan China membawakan manfaat yang begitu besar baik bantuan ekonomi, kesempatan luas untuk bergabung dalam pasar China, atau munculnya kebijakan-kebijakan yang akan menguntungkan. Hal ini pun dialami oleh Myanmar, sebagai negara yang berbatasan langsung dengan China. Selain mendapat bantuan hubungan historis, merupakan hal yang tergolong mudah bagi China untuk mengimplementasikan politik hegemoninya di Myanmar yang tengah mengalami konflik dan membutuhkan banyak bantuan.

China memulai politik hegemoninya di Myanmar melalui aspek ekonomi, dimana China memberikan banyak bantuan ekonomi dengan menjadi mitra dagangnya ataupun mendirikan banyak proyek yang bernilai di kawasan Myanmar seperti pembangunan bendungan, investasi pada infrastruktur dan lain sebagainya. Hal ini menciptakan ketergantungan ekonomi diantara keduanya bahkan hingga tahun 2017. Salah satu aspek yang membuat Myanmar bergantung pada China untuk kemajuan ekonominya adalah bidang agrikultur. Bidang agrikultur Myanmar telah berusaha untuk menembus pasar yang lebih besar seperti Eropa dan Amerika, namun hingga bulan Juni 2017, pasar utama Myanmar tetaplah China (Thant, 2017). besarnya hegemoni China di Myanmar dapat disederhanakan menjadi beberapa aspek penting dan krusial seperti dalam tabel berikut ini : (dari berbagai sumber)

| Aspek | Kontribusi China | Perbandingan |
|---|---|--|
| Ekspor – Impor (2016) Myanmar ekspor \$11,7 B, impor \$ 15,7 B | Ekspor ke China \$ 4,77 B Impor dari China \$ 8,19 B Hampir 50 % dari total | Posisi kedua ekspor, Thailand dengan \$ 2,24 B Posisi kedua impor, Singapura dengan \$ 2,28 B |

| | | |
|--|---|---|
| Investasi | China investasi \$18 B dalam 183 proyek di Myanmar. Mencakup 30% dari total investasi masuk | Posisi kedua diraih Singapura dengan total investasi \$ 16 B |
| Keamanan dari tahun 1990 - 2016 | Aircraft 120 Armoured Vehicle 696 Missiles 1029 Naval Vessels 21 Artillery 125 | Jumlah total, persentase Aircraft : 264 unit, 45% Armoured : 886 unit, 78% Missiles : 4222 unit, 24% Naval : 27 unit, 77% Artillery : 392 unit, 31 % |
| Pendanaan atau Pinjaman Luar Negeri | China meminjamkan \$ 3,96 B Berkisar 44 % dari jumlah total pinjaman | Sebanyak \$ 3,3 B lainnya merupakan akumulasi pinjaman dari negara-negara Paris Club |

China's "Peaceful Rise" sebagai landasan kebijakan China di Myanmar

Istilah China's "Peaceful Rise" merupakan hal yang lekat jika membahas mengenai dominasi ekonomi China di abad 21. Istilah tersebut sebenarnya sudah muncul di tahun 1990, namun masih berupa pandangan kasar dari masyarakat dunia tentang pesatnya pertumbuhan China terutama di ranah ekonomi. Kemudian istilah tersebut menguat melalui kebijakan "China's long-term national goal 2020", yang disampaikan pada konvensi ke 16 CCP dan kongres rakyat nasional ke 11 (Yi, 2005). Tujuan yang disampaikan pemerintah China saat itu adalah mengubah masyarakat China saat ini menjadi masyarakat yang "hexie", dimana populasi secara umum dapat menikmati hidup yang lebih harmoni dan berlimpah (Yi, 2005).

Gagasan kebangkitan China ini merebak di tahun babak akhir abad ke 21, ketika pertumbuhan ekonomi China semakin cepat dan posisinya di perekonomian dunia terus naik (Yue, 2008). Namun, pertumbuhan China tersebut harus menerima respon negatif karena dianggap sebagai penghalang oleh beberapa pihak. Sudah 40 tahun memang pertumbuhan China menjadi perhatian dunia, terutama pihak barat (Feng, 2017). Perhatian atas kebangkitan China di bidang ekonomi, geopolitik dan militer telah mendorong banyak orang di Amerika terutama golongan neo konservatif dan liberal untuk mengembangkan "China threat theory" (Moak, 2017).

China's "Peaceful Rise" merupakan kebijakan yang ditujukan sebagai *counter* atas ketakutan internasional terkait kebangkitan China (Pan, 2006). Kebijakan ini menyatakan bahwa China akan membangun perekonomian dengan memanfaatkan keuntungan lingkungan internasional yang damai, dan disaat bersamaan akan menjaga dan berkontribusi untuk

kedamaian dunia dengan hasil pembangunannya (Pan, 2006). Terdapat 5 poin penting yang tercantum dalam kebijakan ini yakni : (Guoguang, 2006)

- China akan melibatkan keuntungan dari kedamaian dunia untuk memajukan pembangunannya, dan sebagai gantinya, akan menjaga kedamaian dunia dengan pembangunannya
- China akan bergantung pada kekuatannya sendiri untuk memperjuangkan kebangkitannya yang damai
- China akan tergabung secara aktif dan berkelanjutan dalam aktivitas ekonomi dan globalisasi melalui kebijakan “opening-up”
- Tahapan-tahapan yang akan dilalui China akan melibatkan beberapa generasi
- Kebangkitan China tidak akan menghalangi negara lain atau menimbulkan ancaman terhadap negara lain atau mengorbankan negara-negara tertentu.

Namun, istilah dan kebijakan mengenai kebangkitan China ini mulai berubah di era abad 21. Pada September 2011, pemerintah China mengeluarkan sebuah dokumen resmi berjudul “*China’s Peaceful Development*” (Loh, 2011). Berbeda dengan *China’s peaceful rise* yang cenderung abstrak untuk sekedar menggambarkan kebangkitan China dari masalah yang kelam dan keterpurukan, *China’s peaceful development* merupakan tujuan utama pemerintah saat ini untuk lebih berfokus pada pembangunan ekonomi. *Peaceful development* memiliki dua pokok tujuan yakni “good neighbourliness” dan “global responsibility”. China menekankan jika ia akan berusaha untuk menciptakan situasi damai baik itu di kancah regional maupun internasional karena keadaan damai tersebut dapat mendukung perkembangan China untuk menuju negara superpower dimasa depan dan merealisasikan tujuan nasionalnya di tahun 2020. Hal ini ditunjukkan dengan pernyataan resmi dari presiden China saat ini, Xi Jinping, dalam sebuah konferensi di Amerika bahwa “*China should guide international security towards a more just and rational new world order*” (The Economist, 2017).

Hegemoni China ini sesuai dengan pandangan Robert Keohane dalam teorinya “*Hegemonic Stability Theory*”. Pemikiran dasar mengenai teori ini pada awalnya diusung oleh Charles P. Kindleberger pada tahun 1973, yang mana dilanjutkan dan dilabeli oleh Robert O. Keohane (Gowa, 1989). Teori ini dianggap penting dan sangat efektif apabila hendak menganalisa mengenai kestabilan dan ketidakstabilan dalam dunia ekonomi politik. Secara lebih lanjut dijelaskan, teori stabilitas hegemonik menekankan bahwa peran dari kekuatan hegemoni akan menentukan hubungan pembangunan ekonomi serta stabilitas politik didalam

struktur internasional (Yazid, 2015). Di dalam teori ini terdapat suatu jaminan bahwa stabilitas hanya bisa diciptakan oleh negara atau aktor yang mempunyai kekuatan hegemoni. Jaminan ini hadir karena adanya rasa percaya bahwa pemilik kekuatan hegemoni merupakan yang terkuat dan terbaik diantara yang lainnya, sehingga ia memiliki keuntungan lebih yang didapat secara tidak langsung yakni, menentukan stabilitas struktur internasional

Sebagaimana disebutkan dalam teori, kebijakan *China's Peaceful Rise* untuk senantiasa mendukung terciptanya perdamaian atau stabilitas global tersebut lantas menjadi alasan utama akan keterlibatan China diberbagai konflik yang ada, salah satunya adalah Myanmar. Sebagai negara yang berbatasan langsung dengan China, maka Myanmar termasuk dalam regional yang harus dijaga kedamaiannya berdasarkan kebijakan “regional first” China. Terciptanya kedamaian Myanmar merupakan langkah pertama China untuk menciptakan kondisi internasional yang senantiasa damai dan mendukung perkembangan ekonominya. Oleh karena itu, China melaksanakan perannya sebagai penjaga kedamaian dunia dengan melakukan banyak kebijakan untuk membantu pemerintah Myanmar menangani krisis di negaranya. Berbagai kebijakan dan sikap politik telah China lakukan sebagaimana disampaikan pada bab sebelumnya. China menggunakan segala cara, baik itu melalui kekuatan ekonomi maupun politiknya.

Kuatnya hegemoni China untuk menciptakan perdamaian di Myanmar hingga saat ini, di akhir tahun 2017 memang belum menunjukkan hasil yang signifikan berupa perjanjian damai atau gencatan senjata. Walaupun China telah memberikan pendekatan yang intim pada salah satu etnis yang diniali menjadi pemimpin atau inisiator bagi etnis-etnis kecil lainnya, UWSA, kesepakatan damai seutuhnya belum dapat dimiliki oleh Myanmar. Namun menilik kembali pada usaha yang kini tengah Myanmar bangun yakni “21st Panglong Peace Conference”, intervensi China dengan menjadi jembatan kedua belah pihak yakni etnis utama, UWSA dan Myanmar tidak bersifat nihil hasil. Pencapaian-pencapaian positif yang dapat diartikan sebagai satu langkah menuju kedamaian telah terlihat di setiap negosiasinya.

Perjanjian damai Myanmar dimulai dengan National Ceasefire Agreement (NCA) pada bulan Maret 2015. Perjanjian ini belum dapat terealisasikan karena dari 15 etnis yang diundang, hanya 8 etnis yang mau menandatangani keseluruhan draft tersebut (Lat, Toe, Kyaw, & Mar, 2015). Dalam proses negosiasi damai selanjutnya, “21st century panglong conference”, Myanmar cenderung mengabaikan keberadaan blok oposisi tersebut dan memfokuskan diri pada etnis-etnis yang telah menandatangani NCA sebelumnya. Etnis yang menandatangani NCA tersebut memang telah mendapatkan undangan resmi dari pemerintah Myanmar untuk

berpartisipasi kembali secara aktif pada proses negosiasi selanjutnya, konferensi Panglong, bahkan tidak hanya itu, etnis-etnis tersebut mendapatkan kesempatan untuk berdialog dengan pemerintah Myanmar secara langsung untuk membahas hal-hal diluar konferensi (Kumbun, 2017). Lamanya proses yang dilalui Myanmar ini memicu tekanan dari Amerika untuk segera mengikat etnis dalam satu perjanjian. Tekanan tersebut pun memicu China untuk mengambil tindakan. China melalui menteri luar negerinya kemudian merespon bahwa China menyambut dan mendukung semua tahapan politik yang tengah dilalui Myanmar (Slodkowski, 2015).

Namun hal berbeda terjadi pada tahap kedua perjanjian Panglong. Kehadiran hampir seluruh etnis di Myanmar pada saat itu dinilai merupakan satu langkah positif untuk terciptanya stabilitas di Myanmar. Terdapat 2 blok oposisi terkait perdamaian di Myanmar, dan mereka hadir pada pertemuan kedua konferensi Panglong tersebut, FPNCC yang dipimpin oleh UWSA dan UNFC yang berada di kawasan tenggara Myanmar. Di dalam konferensi tersebut, FPNCC masih menekan pemerintah Myanmar untuk mencari alternatif lain terkait NCA dan UNFC masih bernegosiasi tentang syarat-syarat untuk penandatanganan NCA (Nyein, 2017). Sebagai hasil dari konferensi tahap 2, terdapat 37 dasar yang telah diadopsi dari keseluruhan 41, termasuk 12 poin dibidang politik (Qingrun, 2017). Beberapa konsensus penting yang menjadi hasil pada konferensi tahap dua ini adalah demokrasi federal, persamaan hak semua kelompok etnis dan desentralisasi kekuasaan ke daerah otonom (Qingrun, 2017). Keberhasilan yang dicapai ini tidak dapat dilepaskan dari peran China yang mendukung etnis dan pemerintah Myanmar, menyediakan forum bicara untuk oposisi dan pemerintah Myanmar dan lain sebagainya. China telah menjadi mitra yang hebat bagi Myanmar karena membantu dengan sangat intens untuk menciptakan situasi kondusif dan suportif di dalam konferensi ini sehingga antara kedua belah pihak partisipan dapat saling mendengarkan opininya masing-masing dan tercipta draft perjanjian baru yang disetujui.

Kesimpulan

Myanmar merupakan salah satu negara yang hingga kini belum dapat terbebas dari belenggu konflik etnis. Keadaan politik dan ekonomi kacau balau karena tiap-tiap etnis mengadakan bentrokan baik dengan pemerintah Myanmar, maupun antar etnis dalam tujuan merebut wilayah kekuasaan. Tentu hal ini menarik perhatian dunia untuk turut ikut campur dalam penyelesaian konflik tersebut, tidak terkecuali China sebagai negara terdekat yang berbatasan langsung dengan Myanmar. Keamanan dan stabilitas Myanmar menjadi hal penting bagi China karena selaras dengan kebijakan "*China's peaceful rise*" yang salah satu poinnya

adalah membantu menciptakan keamanan dan stabilitas global bersamaan dengan pertumbuhan negaranya. China dalam kebijakan dan sikapnya di Myanmar menerapkan dua arah pendekatan pada dua aktor yang berbeda, yakni pada etnis yang bersangkutan UWSA dan pada pemerintah Myanmar Naypyidaw.

Perspektif analisa pertama yakni konsep economy-security nexus diterapkan oleh China untuk mendekati aktor etnis-etnis partisipan, dengan fokus utama adalah United Wa State Army (UWSA) yang dinilai menjadi ketua dari etnis-etnis minoritas di Myanmar. Berawal dari kedekatan China dengan Communist Party of Burma (CPB), jalur internalisasi kebijakan di Myanmar sudah terbuka lebar. Banyak bantuan ekonomi China yang mengalir ke UWSA baik dalam bentuk resmi maupun tak resmi. Bantuan ekonomi resmi tersebut berasal dari hubungan perdagangan pemerintah China dan UWSA, dimana impor dan ekspor keduanya cukup masif dibidang bahan-bahan baku baik alam maupun mineral. Sementara hubungan tidak resmi terjalin antara masyarakat China dan UWSA, dalam berbagai bentuk seperti jual beli senjata, pendanaan langsung oleh perusahaan China bahkan jual beli barang ilegal seperti opium.

Derasnya dana resmi dan tidak resmi tersebut menjadikan China dan UWSA sebagai mitra yang dekat di segala aspek. Hal ini pun menjadi celah bagi China untuk turut mengambil peran dalam perdamaian yang kini diusung Myanmar dalam bentuk Nationwide Ceasefire Agreement (NCA) dan konferensi Panglong ke 21. Hubungan dekat antara China dan UWSA yang diawali dari aspek ekonomi tersebut membuat UWSA bergantung dengan China. Ditunjukkan dengan permintaan khusus UWSA pada pemerintah Myanmar untuk mengikutsertakan China sebagai pihak ketiga di dalam negosiasi damai, atau permintaan China untuk melakukan negosiasi dengan pemerintahan Myanmar untuk kehadiran UWSA di konferensi Panglong ke 21.

Kehadiran China di dalam alur negosiasi damai Myanmar tersebut diterima baik oleh pemerintah Naypyidaw. Dengan perspektif analisa teori stabilitas hegemonik ini, China menciptakan ketergantungan dan kedekatan hubungan dengan pemerintah Myanmar untuk melancarkan kebijakannya. Diawali dari hal yang sama, China memanfaatkan kekuatan ekonominya sehingga Myanmar menjadikan China partner atau mitra utama didalam setiap aspeknya. Kebergantungan Myanmar tersebut, membuat Myanmar tidak memiliki pilihan lain untuk menolak peran China dalam negosiasi damainya. Sebaliknya, Myanmar memandang China sebagai titik terang penyelesaian konflik etnis selama ini karena Chinalah yang memiliki

kedekatan dan kesempatan untuk berdialog dengan etnis-etnis tersebut secara langsung. Adanya rasa ketidakpercayaan etnis terhadap pemerintah Myanmar juga menjadi faktor pendukung China sebagai pihak solutif diantara kedua belah pihak.

Walau memiliki pendekatan yang berbeda bagi tiap aktor, China memastikan posisinya di dalam konflik ini sebagai pihak yang netral. Walau banyak bantuan yang mengalir kepada etnis pemberontak, China memiliki satu tujuan agar dapat berdialog atau bahkan membujuk secara tidak langsung terhadap para etnis tersebut agar tercipta situasi kondusif dalam negosiasi damai dengan pemerintah Myanmar. Usaha China tersebut, hingga pada akhir tahun 2017 telah menunjukkan tahapan yang positif. Sebanyak 8 dari 15 etnis yang diundang ke NCA telah menandatangani dan setuju akan perjanjian damai tersebut. Selanjutnya dalam konferensi Panglong, hampir semua etnis yang berada di Myanmar termasuk etnis yang tidak menyetujui NCA telah diundang dan hadir, bahkan FPNCCC yang dipimpin oleh UWSA sebagai kelompok etnis yang menolak NCA telah melakukan negosiasi ulang tentang alternatif baru.

REFERENSI

Buku :

- Keenan, P. (2016). *The UWSA and The Future : Major Concerns for Shan States and NLD-led Government*. Myanmar: EBO Myanmar.
- Kramer, T. (2007). *The United Wa State Party : Narco-Army pr Ethnic Nationalist Party?* Washington D.C: East-West Center Washington.
- Lintner, B. (2017). *The People's Republic of China and Burma : Not Only Pauk-Phaw*. Washington D.C: Project 2049 Institute.
- Pempel, T. (2013). *The Economy - Security Nexus in Northeast Asia*. New York: Routledge.
- Wilson, T. (2006). *Myanmar's Long Road to National Reconciliation*. Singapura: Institute of Southeast Asian Studies.
- Loh, S. H. (2011). *China : China's Rhetoric of Peace*. London: Royal Institute of International Affairs.

Jurnal :

- Gowa, J. (1989). Rational Hegemons, Excludable Goods, and Small Groups : An Epitaph for Hegemonic Stability Theory. *World Politics Vol. 41 No. 3*, 307 - 324.
- Guoguang, W. (2006). The Peaceful Emergence of a Great Power? *Social Research Vol. 73 No 1*, 317-344.

- Yazid, M. N. (2015). The Theory of Hegemonic Stability, Hegemonic Power and International Political Economic Stability. *Global Journal of Political science and Administration Vol 3, No 6*, 67-79.
- Yi, X. (2005). Chinese Foreign Policy In Transition : Understanding China's "Peaceful Development". *The Journal of East Asian Affairs, Vol. 19, No. 1* , 74-112.
- Yue, J. (2008). Peaceful Rise of China : Myth or Reality? *International Politics*, 439 - 456.

Website :

- Feng, J. (2017, November 2017). *Western Elites Find New 'China Threat' Theory*. Retrieved from Global Research: <https://www.globalresearch.ca/western-elites-find-new-china-threat-theory/5619163>
- GlobalEDGE. (2017, Januari 12). *China : Trade Statistics*. Retrieved from Global Business Knowledge: <https://globaledge.msu.edu/countries/china/tradestats>
- Kumbun, J. (2017, Oktober 12). *Nationwide Ceasefire Agreement is a Forlorn Hope*. Retrieved from The Irawaddy: <https://www.irrawaddy.com/opinion/guest-column/nationwide-ceasefire-agreement-forlorn-hope.html>
- Kuppuswamy, C. (2013, November 27). *Myanmar : United Wa State Army*. Retrieved from South Asia Analysis Group: <http://www.southasiaanalysis.org/node/1417>
- Lat, W. K., Toe, W. N., Kyaw, N. R., & Mar, K. (2015, Oktober 15). *Myanmar Signs Historic Cease-Fire Deal With Eight Ethnic Armies*. Retrieved from Radio Free Asia: <https://www.rfa.org/english/news/myanmar/deal-10152015175051.html>
- Lintner, B. (2017, Mei 26). *Who Are The Wa?* Retrieved from The Irawaddy: <https://www.irrawaddy.com/from-the-archive/who-are-the-wa.html>
- Mang, L. M., Aung, T. T., & Dinmore, G. (2016, Mei 2). *UWSA Wants China in Peace Process*. Retrieved from Myanmar Times: <https://www.mmmtimes.com/national-news/20059-uwsa-wants-china-in-peace-process.html>
- Moak, K. (2017, Agustus 2). *Real Reason behind "China treat" Theory*. Retrieved from Asia Times: <http://www.atimes.com/real-reasons-behind-china-threat-theory/>
- Nyein, N. (2017, November 27). *Third Session of 21st-Century Panglong Peace Conference to Convene in January*. Retrieved from The Irawaddy: <https://www.irrawaddy.com/news/burma/third-session-21st-century-panglong-peace-conference-convene-january.html>
- Pan, E. (2006, April 14). *The Promise and Pitfalls of China's "Peaceful Rise"*. Retrieved from Council on Foreign Relations: <https://www.cfr.org/background/promise-and-pitfalls-chinas-peaceful-rise>
- Qingrun, S. (2017, Juni 1). *Second Panglong conference sees significant breakthroughs*. Retrieved from Mizzima: <http://www.mizzima.com/news-opinion/second-panglong-conference-sees-significant-breakthroughs>
- Reuters. (2016, Desember 28). *Through Reclusive Wa, China's Reach Extends into Suu Kyi's Myanmar*. Retrieved from VOA : Asia: <https://www.voanews.com/a/through-reclusive-wa-state-china-reach-extends-into-myanmar/3655121.html>

- Slodkowski, A. (2015, Oktober 15). *Myanmar signs ceasefire with eight armed groups*. Retrieved from Reuters: <https://www.reuters.com/article/us-myanmar-politics/myanmar-signs-ceasefire-with-eight-armed-groups-idUSKCN0S82MR20151015>
- Slodkowski, A., & Lee, Y. (2016, December 29). *Through Reclusive Wa, China's Reach Extends into Suu Kyi's Myanmar*. Retrieved from Reuters: <https://www.reuters.com/article/us-myanmar-wa-china/through-reclusive-wa-chinas-reach-extends-into-suu-kyis-myanmar-idUSKBN14H1V8>
- Tha, K. P. (2013, Oktober 3). *The Demise of a Once Powerful Communist Party—Now in Burmese*. Retrieved from The Irawaddy: <https://www.irrawaddy.com/news/burma/demise-powerful-communist-party-now-burmese.html>
- Thant, H. (2017, Juni 21). *Agricultural exports still rely on neighbouring markets*. Retrieved from Myanmar Times: <https://www.mmtimes.com/national-news/nay-pyi-taw/26483-agricultural-exports-still-rely-on-neighbouring-markets.html>
- The Economist. (2017, April 22). *America and China's strategic relationship*. Retrieved from The Economist: <http://www.economist.com/news/special-report/21720714-after-seven-decades-hegemony-asia-america-now-has-accomodate-increasingly>
- The Observatory of Economic Complexity. (2018, Februari 19). *China*. Retrieved from OEC: <https://atlas.media.mit.edu/en/profile/country/chn/>
- Vrieze, P. (2017, Maret 2). *Into Myanmar's Stalled Peace Process Steps China*. Retrieved from VOA News : Asia: <https://www.voanews.com/a/myanmar-peace-process-china/3746486.html>
- World Bank. (2017, Februari 17). *GDP Growth (Annual %)*. Retrieved from The World Bank : Data: <https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD.ZG?contextual=default&locations=CN-US>
- Xinhua. (2017, Oktober 18). *China never seeks hegemony, expansion: Xi*. Retrieved from 19th CPC National Congress: http://www.xinhuanet.com/english/2017-10/18/c_136688622.htm

Dokumen :

- Transnational Institute. (2016). *China's Engagement in Myanmar : From Malacca Dilemma to Transition Dilemma*. Myanmar: Myanmar Policy Briefing.
- Sun, Y. (2017). *China and Myanmar's Peace Process*. Washington DC: United States Institute of Peace.